PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

NUR KHIKMAH

NIM. B1011211155

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Nur Khikmah
NIM	:	B1011211155
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Dana Perimbangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 1 Oktober 2025



Nur Khikmah
NIM. B1011211155

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Nur Khikmah
NIM	:	B1011211155
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Dana Perimbangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 1 oktober 2025

Nur Khikmah
NIM. B1011211155

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Dana Perimbangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Penanggung Jawab Yuridis

Nur Khikmah
B1011211155

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 24 September 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si.	29/9/2025	
		NIP 197505212002122001		
2.	Ketua Penguji	Rio Laksamana, S.E., M.E.	29/9 2025	
		NIDN 1110098503		
3.	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E.	29/9 2025	
		NIP 198610022019031004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 29 SEP 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, kemurahan dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Dana Perimbangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua" ini merupakan hasil dari proses penelitian dan penulisan yang panjang, yang tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Restiatun, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini bisa diselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama saat seminar proposal yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen penguji pertama saat ujian tugas akhir yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak Rio Laksamana, S.E., M.E. selaku dosen penguji kedua yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Suhardi dan Ibu Tuti Halmina, orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat yang tidak henti-hentinya mendoa'kan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat serta dukungan baik secara moril dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai menjadi seorang sarjana.
9. adik penulis yang amat penulis sayangi Muhammad Alfaisal terima kasih atas semua yang diberikan dan dilakukan untuk penulis. Serta Keluarga besar Nek Putu yang selalu memberikan dukungan moril, memotivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani masa perkuliahan ini.
10. Sahabat penulis tercinta dan tersayang seperti saudara sendiri Sukmawati, Ayuda Sari, Yolanda, Sonia Dewitri dan Erinkha Miftah Urrahmah terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan yang sudah menemani hari-hari, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran random maupun bantuan dan tidak pernah meninggal penulis sendirian dalam kondisi senang dan sedih selalu menjadi sosok dibelakang layar dari masa awal perkuliahan ini, saling berproses dan berkembang bersama dari yang awal kenal masih dari masa remaja sampai jadi orang dewasa yang selalu memikirkan masa depan yang tidak pernah ada habisnya sampai nanti kita tetap berteman hingga menjadi orang yang sukses yang bisa mencapai cita-cita, dengan pekerjaan serta karir yang baik dan berada ditahap yang selalu kita bayangkan dan tidak pernah disangka nantinya.
11. Orangtua, Kakak, abang, beserta keluarga besar dari sahabat penulis yaitu Sukmawati yang sudah menyayangi penulis seperti anak, adik dan kakak

kandung nya sendiri, terima kasih untuk semua support dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis.

12. Teman semasa menjadi renjani Anisa dan Dinda yang tidak pernah disangka bisa bertemu dan berteman walaupun dengan kampus yang berbeda bisa menjadi teman dekat, teman ngopi, teman bercerita tentang keluh kesah kerasnya dunia serta menjadi penyemangat penulis dalam menulis tugas akhir ini.
13. Teman seperjuangan semasa perkuliahan Progam Studi Ekonomi Pembangunan, IESP FEB UNTAN Angkatan 2021 yang menjadi teman belajar selama masa perkuliahan, tempat bertanya, berproses dan selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Kepada semua pihak yang terlibat dalam kehidupan penulis dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih juga atas doa dan dukungannya selama ini.
15. Seluruh Civitas Akademika, Staff Akademik, Perpustakaan dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam proses administrasi demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
16. Dan terakhir, terima kasih keapada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun yang bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini agar lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, 1 oktober 2025

Nur Khikmah

NIM. B1011211155

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta tingkat pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Bentuk penelitian ini deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder tahun 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan data runtun waktu (time series) dari tahun 2019 sampai 2023 pada 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif, RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Adapun variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Kata Kunci: Kemiskinan, DBH, DAU, DAK, RLS

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

Oleh : Nur Khikmah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional seringkali diukur melalui keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi fokus kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Papua tercatat sebesar 26,03%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,36%. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius, mengingat Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil tambang, hutan dan kekayaan laut, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kekayaan alam tersebut belum mampu dimaksimalkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan di Papua dilakukan melalui berbagai program pemerintah, salah satunya dengan mekanisme transfer fiskal berupa Dana Perimbangan. Dana ini meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun, efektivitas dana perimbangan dalam menurunkan kemiskinan masih dipertanyakan, karena penggunaannya sering kali digunakan untuk belanja rutin dibandingkan program yang produktif. Selain faktor fiskal, pendidikan juga merupakan variabel penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Pendidikan, yang dalam penelitian ini diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menjadi salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dengan pendapatan layak, sehingga berpotensi keluar dari jerat kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya akses dan kualitas pendidikan di Papua menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang sulit diatasi. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan tingkat pendidikan (RLS) berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas transfer fiskal dan faktor pendidikan dalam mengurangi kemiskinan, serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah di Papua.

2. Permasalahan

Provinsi Papua memiliki tantangan dalam upaya mengurangi Tingkat kemiskinan di berbagai Kabupaten/Kota. pemerintah telah mengalokasikan dana perimbangan dalam jumlah besar dan daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. DBH diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi dalam praktiknya sering digunakan untuk belanja pegawai, sehingga kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan patut diteliti. DAU yang porsinya paling besar dalam struktur penerimaan daerah sering digunakan untuk belanja rutin, sehingga efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan masih diperdebatkan. DAK yang seharusnya diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus (misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) diduga belum dikelola secara optimal sehingga hasilnya belum signifikan dalam menekan angka kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik diyakini mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat, namun fakta menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Papua masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan apakah dana perimbangan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, serta variabel mana yang paling dominan memengaruhi kondisi kemiskinan di Papua.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diuraikan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan kausal yang bersifat asosiatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis serta memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti. Lokasi penelitian mencakup 9 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua, dengan cakupan waktu penelitian dari tahun 2019 hingga 2023. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder, yaitu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).Variabel bebas dalam penelitian ini terdapat Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rata-Rata Laama Sekolah. Variabel terikatnya adalah Kemiskinan. Metode yang diterapkan adalah regresi linear berganda, dilakukannya penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rata-Rata Laama Sekolah terhadap Kemiskinan. Adapun alat atau aplikasi yang digunakan untuk menguji data yaitu menggunakan Eviews 13.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terbaik. Adapun variabel dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota

Provinsi Papua. Variable dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan variable rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap kamiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

6. Kesimpulan dan Saran

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai positif tetapi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana yang diterima cukup besar, pengelolaannya belum diarahkan secara optimal untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang menyentuh langsung masyarakat miskin.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena digunakan untuk membiayai pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik yang meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai positif tetapi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketidakefektifan ini diduga akibat alokasi dana yang tidak tepat sasaran, rendahnya kapasitas serapan daerah, atau proyek yang tidak menjangkau kelompok masyarakat miskin secara langsung.
4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pendidikan terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan di Papua.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Dana Bagi Hasil perlu diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk belanja rutin.
2. Reformulasi penggunaan DAU sangat diperlukan. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan DAU untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan pengembangan keterampilan kerja agar memiliki efek jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan penggunaan DAK penting dilakukan agar dana tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kelompok miskin melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi.
4. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akses sekolah, terutama di daerah terpencil. Program-program seperti beasiswa, pelatihan keterampilan dan peningkatan mutu guru harus menjadi prioritas agar dampak pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan semakin tinggi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR PENGESAHAN YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Tinjauan Teori 6
2.1.1 Kemiskinan 6
2.1.2 Dana Bagi Hasil 7
2.1.3 Dana Alokasi Umum 8
2.1.4 Dana Alokasi Khusus 8
2.1.5 Rata-rata Lama Sekolah 9
2.1.6 Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan 9
2.1.7 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan 10
2.1.8 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan 10
2.1.9 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan 10
2.2 Tinjauan Empiris 11
2.2.1 Dana Bagi Hasil 11
2.2.2 Dana Alokasi Umum 11
2.2.3 Dana Alokasi Khusus 12
2.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah 12
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 13
2.3.1 Kerangka Konseptual 13
2.3.2 Hipotesis Penelitian 13
3. METODE PENELITIAN 13
3.1 Uji Penentuan Model 16
3.2 Uji Statistik 16
4. HASIL DAN PEMBAHASAAN 16
4.1 Hasil Penelitian 16
4.1.1 Uji Penentuan Model Regresi Data Panel 16
4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda 17

4.1.3 Hasil Uji Statistik 18
4.2 Pembahasaan Penelitian 18
4.2.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 18
4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 19
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 20
4.2.4 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 21
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
5.1 Kesimpulan 22
5.2 Rekomendasi 22
DAFTAR RUJUKAN 23
LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur Dalam Kurun Waktu 5 tahun Terakhir (2019-2023) 2
Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Persen) 2
Tabel 3 Dana Bagi Hasil di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 3
Tabel 4 Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023..... 4
Tabel 5 Dana Alokasi Khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023..... 5
Tabel 6 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Tahun)..... 6
Tabel 7 Uji Model Regresi 17
Tabel 8 Hasil Uji Regresi Berganda dengan Fixed Effect Model 17
Tabel 9 Hasil Uji F-statistik 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep 13

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

[1]Nur Khikmah
Universitas Tanjungpura, Indonesia

[2]Dr. Restiatun, SE.,M.Si
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of intergovernmental transfers, consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), as well as the level of education measured by the Average Years of Schooling (RLS), on poverty levels in the regencies/municipalities of Papua Province. This research is descriptive-quantitative in nature, using secondary data from 2019–2023. The analytical method employed is multiple linear regression, with time series data from 2019 to 2023 across 9 regencies/municipalities in Papua Province. The results show that the DAU variable has a positive effect, while the RLS variable has a significant negative effect on poverty. Meanwhile, the DBH and DAK variables have no effect on poverty in the regencies/municipalities of Papua Province.

Keywords: *Poverty, DBH, DAU, DAK, RLS*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta tingkat pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Bentuk penelitian ini deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder tahun 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan data runtun waktu (time series) dari tahun 2019 sampai 2023 pada 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif, RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Adapun variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Kata Kunci: Kemiskinan, DBH, DAU, DAK, RLS

B1011211155@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia secara bertahap menurun dari waktu ke waktu, meski begitu pemerintah terus melakukan banyak upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah tingkat pengurangan jumlah orang miskin. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan cara mengintegrasi dan berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah (Yani dkk., 2022).

Wilayah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di Bagian Timur. Provinsi Papua kaya akan sumber daya alam dan hal ini menjadi bekal utama daerah ini untuk berkembang, tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keaneka ragaman biotanya. Provinsi Papua berada pada posisi paling tinggi tingkat kemiskinannya apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia Bagian Timur. Posisi yang sangat tinggi inilah tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa daerah dengan potensi yang berlimpah tersebut justru dikenal sebagai provinsi termiskin, bahkan sangat jauh apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan negara Indonesia (Tonapa dkk., 2022).

Tabel 1 Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur Dalam Kurun Waktu 5 tahun Terakhir (2019-2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	608,69	540,02	532,36	532,36	565,46
Jayapura	706,49	637,73	628,45	692,53	662,34
Keerom	557,31	501,43	492,13	492,22	514,48
Kepulauan Yapen	567,67	521,1	512,91	513,13	539,46
Mamberamo Raya	735,69	674,15	667,26	669,25	694,03
Sarmi	726,45	643,3	631,56	631,56	656,42
Supiori	464,28	416,49	408,33	408,33	428,51
Waropen	582,79	532,58	522,62	522,62	543,83
Kota Jayapura	660,19	592,1	580,49	580,49	640,4

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Tabel 1 menunjukan rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua tercatat sebesar 268,97% lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin Nasional Indonesia yaitu sebesar 97,17% dan Provinsi Bali yang rata-rata penduduk miskinnya terendah yaitu sebesar 4,18%. Papua memiliki rata-rata garis kemiskinan nomor 2 di Indonesia bagian Timur, yaitu sebesar Rp 602.138. Rata-rata garis kemiskinan tertingginya yaitu Provinsi Papua Barat sebesar Rp 641.968 dan rata-rata garis kemiskinan terendah, yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 376.291.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	25,50	24,57	24,45	24,48	23,53
Jayapura	13,13	12,44	12,13	11,94	11,45
Keerom	16,83	16,32	16	15,77	15,68
Kepulauan Yapen	27,13	26,30	26,09	26,15	25,89
Mamberamo Raya	29,13	28,38	28,78	30,73	29,63
Sarmi	14,41	13,87	13,84	13,76	13,21
Supiori	38,79	36,91	37,91	37,7	36,99
Waropen	30,95	29,54	29,85	30,22	29,16
Kota Jayapura	11,49	11,16	11,39	11,12	10,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Tabel 2 secara umum, tingkat kemiskinan di hampir semua wilayah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Kabupaten Supiori memiliki persentase kemiskinan tertinggi, meskipun ada sedikit penurunan dari 38,79% tahun 2019 menjadi 36,99% di tahun 2023. Kota Jayapura memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan wilayah lain, menurun dari 11,49% tahun 2019 menjadi 10,5% di tahun 2023. Dan tingkat kemiskinan rata-rata di Papua juga menurun, dari 27,53% tahun 2019 menjadi 26,03% pada tahun 2023.

Salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan adalah program Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pardede, 2023)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip daerah penghasil dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. DBH dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), dan sumber daya alam yang berasal dari kehutanan yaitu iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dan dana reboisasi (DR) yang terdiri dari pertambangan umum yang berasal dari iuran tetap dan iuran eksploitasi perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan (Manek dkk., 2016).

Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan pada angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dengan pengelolaan yang tepat maka dapat mencapai tujuan otonomi daerah yaitu mensejahterakan daerah yang berujung pada penurunan tingkat kemiskinan, namun realitanya Dana Bagi Hasil dialokasikan untuk hal yang tidak berpengaruh terhadap usaha penurunan kemiskinan. Contohnya digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang terlalu besar sehingga akan program dan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan menjadi terhambat (Suharto & Aini, 2024).

Tabel 3 Dana Bagi Hasil di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023
(Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	39,07	46,75	44,83	119,37	54,41
Jayapura	52,65	40,79	59,47	128,77	58,74
Keerom	58,65	40,75	60,35	130,96	58,85
Kepulauan Yapen	37,72	46,08	42,65	117,19	53,64
Mamberamo Raya	42,92	46,85	44,78	119,17	51,39
Sarmi	59,45	47,90	64,41	135,77	61,80
Supiori	35,84	43,66	41,03	116,54	50,34
Waropen	44,29	46,26	43,76	118,14	50,40
Kota Jayapura	54,94	73,57	78,53	164,93	124,52

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)

Pada Tabel 3 secara keseluruhan, Semua daerah mengalami kenaikan Dana Bagi Hasil pada tahun 2022, seperti Kota Jayapura yang menerima dana terbanyak sebesar 164,93 Miliar Rupiah dan Supiori berada di posisi terbawah dalam penerimaan dana,

dengan angka terendah di tahun 2019 sebesar 35,84 Miliar Rupiah. Dan tahun 2023 menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari tahun sebelumnya. Seperti Biak Numfor dari 119,37 Miliar Rupiah turun ke 54,41 Miliar Rupiah dan Keerom dari 130,96 Miliar Rupiah turun ke 58,85 Miliar Rupiah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan dan sebagai penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang (Nany dkk., 2022). Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengalokasikan dana yang diterima daerahnya secara simetris maupun tidak simetris. Dengan proporsi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota sekitar 80%-85% dan provinsi sekitar 15%-20%, perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum menggunakan data sesuai dengan peraturan yang dapat dipertanggung jawabkan serta bersumber dari instansi lembaga statistik pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang menertibkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya (Fathiyyah, 2021).

Dana Alokasi Umum banyak dimanfaatkan untuk membiayai operasional daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga Dana Aloasi Umum tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diterima daerah dengan besaran paling tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk belanja daerah, namun belanja daerah dari pengalokasian Dana Alokasi Umum lebih banyak digunakan untuk operasional daerah yang bukan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Dana Alokasi Umum tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan (Suharto & Aini, 2024).

Tabel 4 Dana Alokasi Umum di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	608,69	540,02	532,36	532,36	565,46
Jayapura	706,49	637,73	628,45	692,53	662,34
Keerom	557,31	501,43	492,13	492,22	514,48
Kepulauan Yapen	567,67	521,10	512,91	513,13	539,46
Mamberamo Raya	735,69	674,15	667,26	669,25	694,03
Sarmi	726,45	643,30	631,56	631,56	656,42
Supiori	464,28	416,49	408,33	408,33	428,51
Waropen	582,79	532,58	522,62	522,62	543,83
Kota Jayapura	660,19	592,10	580,49	580,49	640,40

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)

Pada Tabel 4 penurunan alokasi DAU terjadi pada tahun 2020–2021, hampir di semua Kabupaten/Kota. Hal ini kemungkinan besar akibat penyesuaian anggaran nasional selama pandemi COVID-19. Pemulihan terjadi mulai pada tahun 2022, dengan sebagian besar daerah kembali menerima Dana Alokasi Umum yang meningkat atau stabil di tahun 2023. Mamberamo Raya menerima alokasi Dana Alokasi Umum tertinggi setiap tahun, salah satunya pada tahun 2019 sebesar 753,69 Miliar Rupiah dan Supiori menerima Dana Alokasi Umum terendah diseluruh periode, yaitu sebesar 408,33 Mliliar Rupiah pada tahun 2021 dan 2022.

Dana Alokasi Khusus yang dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Apabila program-program khusus dari tahun ke

tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki kualitas hidup. Dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang digunakan untuk membiayai sarana fisik dan sarana non fisik. Sarana dan prasarana dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga akan memberikan akses dalam peningkatan pendapatan sehingga akan menekan tingkat kemiskinan (Joula dkk., 2019).

Keuangan daerah didukung oleh pemerintah pusat dengan memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan yang diberikan guna mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang sesuai dengan tujuan nasional (*Specific Grants*), yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Apabila penerimaan Dana Alokasi Khusus tinggi, maka kesempatan pemerintah dalam mencapai target mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan semakin besar (Sembiring dkk., 2024).

Tabel 5 Dana Alokasi Khusus di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	199,13	160,32	205,85	237,88	207,62
Jayapura	92,71	87,76	89,56	118,87	124,11
Keerom	249,37	55,15	68,61	72,56	68,99
Kepulauan Yapen	88,84	112,27	84,41	164,73	84,37
Mamberamo Raya	152,02	81,80	60,87	62,50	93,33
Sarmi	105,42	107,19	68,74	62,04	68,67
Supiori	110,10	58,72	55,97	69,81	94,55
Waropen	155,50	82,11	66,54	48,11	105,03
Kota Jayapura	87,83	101,06	137,77	86,54	48,30

Sumber data: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)

Pada Tabel 5 menunjukan bahwa sebagian besar daerah mengalami naik-turun alokasi dana, ini mencerminkan kemungkinan perubahan kebutuhan daerah, kebijakan pusat, atau kinerja serapan dana. Biak Numfor memiliki rata-rata alokasi cukup tinggi dibandingkan daerah lain dari 199,13 Miliar Rupiah tahun 2019 menjadi 237,88 Miliar Rupiah tahun 2022 dan turun ke 207,62 Miliar Rupiah di tahun 2023. Kota Jayapura memiliki rata-rata alokasi terendah, terutama pada tahun 2023 yaitu 48,3 Miliar Rupiah, turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Pendidikan sebagai faktor yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Dilihat dari rata–rata lama sekolah untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Pendidikan formal dan non formal bisa berperan penting dalam menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Hasanah dkk., 2021).

Pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk memutus kemiskinan. Di mana digambarkan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan yang tinggi, maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Investasi dalam dunia pendidikan dapat memperbaiki kualitas dan produktivitas masyarakat. Jika kualitas

pendidikan baik, maka kualitas masyarakatnya akan semakin baik sehingga melalui pendidikan akan dapat membuat seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan (Faritz dkk., 2020). Naik atau rendahnya peningkatan rata-rata lama sekolah disebabkan oleh cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikan nya tidak tamat, peran pemerintah juga sangat mendukung dalam peningkatan kualitas SDM yang baik, pendidikan juga menyangkut membangun karakter yang baik sehingga bisa mempertahankan jati diri manusia. Berbagai dihadapi kondisi yang masalah kemiskinan di Indonesia terutama juga di wilayah (Rukmana & Imaningsih, 2023).

Tabel 6 Rata-rata Lama Sekolah di Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Tahun)

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biak Numfor	10,22	10,33	10,34	10,53	10,54
Jayapura	9,79	10,04	10,05	10,27	10,32
Keerom	8	8,01	8,02	8,31	8,57
Kepulauan Yapen	9,19	9,46	9,47	9,69	9,7
Mamberamo Raya	5,65	5,66	5,87	6,12	6,28
Sarmi	8,53	8,82	8,83	9,15	9,36
Supiori	8,6	8,81	8,87	9,09	9,2
Waropen	9,18	9,2	9,21	9,4	9,41
Kota Jayapura	11,55	11,56	11,57	11,74	11,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Tabel 6 secara keseluruhan Kota Jayapura memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi, dari 11,55 tahun 2019 meningkat menjadi 11,84 tahun 2023, mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan Mamberamo Raya yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah, meskipun sedikit meningkat dari 5,65 tahun 2019 menjadi 6,28 tahun 2023. Kota Jayapura menunjukkan hubungan kuat antara tingkat pendidikan dan kemiskinan. Dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih baik, peluang kerja lebih luas dan pendapatan tinggi. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya memperlihatkan korelasi sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan menghambat masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang layak, mengikuti pelatihan keterampilan dan meningkatkan pendapatan.